

ANTARA BALI

Membangun Karakter Masyarakat Berbasis Pengetahuan



PEMKOT DENPASAR AJAK GENERASI MILENIAL GUNAKAN TENUN ENDEK



**GUBERNUR KOSTER:
ARAK, BREM
DAN TUAK BALI SAH
UNTUK PRODUKSI
DAN DIKEMBANGKAN**

Hal. 2



**PEMKAB BADUNG
DORONG MASYARAKAT
BUDIDAYAKAN
HIDROPONIK
DI TENGAH PANDEMI**

Hal. 9

HAL 4

Gubernur Koster: Arak, Brem Dan Tuak Bali Sah Untuk Produksi dan Dikembangkan

Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan minuman arak Bali, brem Bali dan tuak Bali menjadi usaha yang sah untuk diproduksi dan dikembangkan, seiring berlakunya Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal.

"Perpres Nomor 10 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 2 Februari 2021 ini merupakan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja," kata Koster saat memberikan keterangan di Gedung Gajah Jayasabha, Denpasar, Senin.

Sebelumnya, ujar dia, telah berlaku Perpres Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal, sebagai penjabaran Pasal 12 ayat (3) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, menetapkan bahwa industri minuman beralkohol merupakan

bidang usaha tertutup.

Tetapi, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 terdapat ketentuan yang mengubah Pasal 12 UU Penanaman Modal tersebut dengan menetapkan minuman beralkohol tidak merupakan bidang usaha tertutup penanaman modal.

Dalam Perpres Nomor 10 Tahun

2021 itu, ditetapkan bidang usaha industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Provinsi Sulawesi Utara, dan Provinsi Papua dengan memperhatikan budaya serta kearifan setempat.

"Atas nama pemerintah dan krama (masyarakat) Bali, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Joko

Widodo yang telah menerbitkan Perpres Nomor 10 Tahun 2021," katanya.

Perpres tersebut, memperkuat keberadaan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali.

Koster menambahkan, industri minuman keras mengandung alkohol, alkohol anggur, dan malt sebagai bidang usaha terbuka untuk penanaman modal baru di Provinsi Bali juga merupakan respon atas upaya Gubernur Bali melalui Surat Gubernur Bali Nomor 530/2520/Ind/Disdagperin, tertanggal 24 April 2019.

Dalam surat tersebut berisi permohonan fasilitasi revisi untuk pembinaan industri minuman beralkohol tradisional di Bali untuk meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Bali terkait Perpres Nomor 39 Tahun 2014. (ant)



Gubernur Bali Wayan Koster. ANTARA/HO-Pemprov Bali/2021

Wagub Bali: Masyarakat Jangan Takut Divaksin COVID-19



Wakil Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati didampingi Putri Haryani Ardhana Sukawati dan Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali Trisno Nugroho saat disuntik vaksin COVID-19 (Antarnews Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

WAKIL Gubernur Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati mengajak masyarakat di "Pulau Dewata" itu untuk tidak takut dan bersama-sama mengikuti proses vaksinasi COVID-19 yang telah diprogramkan pemerintah.

"Banyak yang bayangkan, vaksinasi (COVID-19) untuk lansia itu menakutkan, tetapi setelah diikuti prosesnya aman-aman saja," kata Wagub Bali yang akrab disapa Cok

Ace setelah menerima suntikan vaksin COVID-19 di RS Bali Mandara, di Denpasar, Rabu.

Ia menerima suntikan vaksin COVID-19 tersebut, sekaligus menandai tahap kedua program vaksinasi di Provinsi Bali.

"Tidak ada gejala mual, pusing, dan semua baik-baik saja," ucap Cok Ace setelah masa observasi selesai disuntik vaksin.

Dia mengaku bersyukur

diberikan kesempatan untuk mendapatkan suntikan vaksin tahap kedua yang secara prioritas akan menjangkau masyarakat kategori lansia tersebut.

Untuk itu, Wagub Cok Ace mengajak masyarakat untuk bersama-sama mengikuti proses vaksinasi COVID-19 yang diprogramkan pemerintah dan mendukung penuh upaya pemulihan pascapandemi.

"Ngiring (mari) divaksin, agar Bali gelis (cepat) aman dan sehat," ujarnya didampingi Putri Haryani Ardhana Sukawati itu.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengatakan vaksinasi tahap kedua utamanya akan menjangkau para lansia dan sektor pelayanan publik.

"Bisa pejabat negara, anggota dewan, ASN, pelaku pariwisata hingga pedagang pasar, semuanya masuk kategori pelayanan publik," ujar Suarjaya.

Vaksinasi kepada pejabat publik seperti Wagub Cok Ace dan

sosok pejabat publik dan tokoh masyarakat lainnya, menurut Suarjaya, juga sebagai suatu bentuk pesan kepada masyarakat bahwa vaksin bukanlah suatu yang patut ditakutkan.

"Sosok pejabat publik serta tokoh masyarakat, yang di antaranya juga masuk kategori lansia tersebut menunjukkan bahwa kita tidak perlu takut divaksin. Semua harus turut divaksin agar lebih aman dan imun terhadap COVID-19," katanya.

Dia menambahkan orang yang telah divaksin kemungkinan terinfeksi COVID-19 tiga kali lebih rendah dari orang yang tidak memperoleh vaksin.

"Orang yang sudah divaksin juga kemungkinannya tiga kali lebih ringan efeknya jika terinfeksi COVID-19. Namun, walaupun sudah divaksin harus digarisbawahi masih harus tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap tidak boleh abai," ujarnya. (ant)

Dekranasda Bali Ajak Semua Pihak Ikut Lestarikan Kain Tenun Endek

KETUA Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Provinsi Bali Putri Koster mengajak semua elemen masyarakat di "Pulau Dewata" itu untuk turut melestarikan kain tenun endek Bali yang merupakan salah satu warisan adiluhung dari nenek moyang.

"Agar eksistensi kain ini tetap terjaga, adalah tanggung jawab kita bersama untuk melestarikannya. Sekarang waktunya kita ambil tanggung jawab. Kita pakai kain tenun yang ditenun oleh para perajin kita. Dari kita, untuk kita," kata dia di Denpasar, Kamis malam.

Menurut istri Gubernur Bali itu, dengan memakai kain tenun asli, perajin dan IKM bisa berkreasi dan berproduksi sehingga kesejahteraan akan terwujud.

"Namun seiring perkembangan zaman, keberadaan kain endek mengalami degradasi dan menghadapi berbagai permasalahan, seperti sulitnya bahan baku benang dan pe-

masaran produk," ujarnya dalam acara bertajuk "Bagaimana Menggaungkan UMKM di Masa Pandemi" itu.

Bahkan, ujar dia, sampai hadirnya produksi massal yang dikerjakan dengan mesin yang banyak beredar di pasaran dengan motif yang mirip dan harga yang lebih murah.

"Hal ini tidak bisa dibiarkan terus berlarut-larut, harus ada upaya baik itu dari pemerintah, 'stakeholder' (pemangku kepentingan) terkait dan juga masyarakat untuk menjaga kelestarian kain yang kini mulai dilirik industri fesyen dunia," ucapnya

Dia menambahkan Pemprov Bali sesuai dengan Visi Nangun Sat Kerthi Loka Bali, memberi perhatian penuh dalam upaya pelestarian serta pengembangan dari kain tenun endek Bali.

Upaya pelestarian kain tenun endek Bali yang telah mengantongi Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradi-



Ketua Dekranasda Bali Putri Koster saat berbicara dalam acara bertajuk "Bagaimana Menggaungkan UMKM di Masa Pandemi" itu (AntaraneWS Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

sional dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia ini terus dilakukan, salah satunya dengan dikeluarkannya Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali. Kebijakan ini merupakan bentuk keberpihakan

pada produk budaya lokal dari Industri Kecil Menengah (IKM) dan UMKM masyarakat Bali.

Oleh karena itu, dia mengajak semua komponen masyarakat untuk membangun kesadaran bersama untuk melestarikan dan mengembangkan warisan adiluhung ini. **(ant)**

Satgas: Di Bali, 90,23 Persen Pasien Positif COVID-19 Sembuh



Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Dewa Made Indra (AntaraneWS Bali/HO-Pemprov Bali/2021)

SATGAS Penanganan COVID-19 Provinsi Bali mencatat hingga Rabu (24/2) sudah sebanyak 30.122 orang atau 90,23 persen pasien positif COVID-19 di daerah itu yang dinyatakan telah sembuh.

"Untuk hari ini saja dilaporkan pasien yang sembuh dari COVID-19 sebanyak 292 orang," kata Ketua Harian Satgas Penanganan COVID-19 Dewa Made Indra di Denpasar, Rabu.

Dikutip dari laman <https://infocorona.baliprov.go.id>, laporan kesembuhan yang terbanyak dari Kota Denpasar (122 orang), Kabupaten Badung (61 orang), Gianyar (26), Klungkung (17), Tabanan (15), Bangli (12), Karangasem (7), Buleleng (6) dan Kabupaten Jembrana (1) orang serta orang dengan domisili dari luar Bali (19) dan warga negara asing (6).

Sedangkan jumlah kumulatif kasus positif COVID-19 hingga Rabu ini menjadi sebanyak 33.384 orang orang. Untuk hari ini ada penambahan kasus baru sebanyak 307 orang.

Sementara itu, jumlah kasus aktif atau pasien yang masih menjalani perawatan di sejumlah rumah sakit rujukan dan tempat karantina menjadi sebanyak 2.364 orang (7,08 persen).

Kemudian jumlah pasien yang meninggal dunia karena COVID-19

di Provinsi Bali secara kumulatif sebanyak 898 orang (2,69 persen). Pada hari ini tercatat ada tujuh orang di Provinsi Bali yang meninggal dunia karena COVID-19.

"Dukungan sepenuh hati dari masyarakat tentunya sangat dibutuhkan untuk memutus penyebaran COVID-19 yang semakin masif di 2021 ini. Tetap disiplin melaksanakan protokol kesehatan kapanpun dan dimanapun," kata Dewa Indra yang juga Sekda Bali itu.

Dewa Indra juga mengajak masyarakat harus bekerja bersama-sama untuk menurunkan kasusnya dengan disiplin menerapakan 6M dan mengurangi aktivitas yang menimbulkan kerumunan.

"6M yakni Memakai masker standar dengan benar, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Mengurangi bepergian, Meningkatkan imun dan Menaati aturan," kata mantan Kepala Pelaksana BPBD Bali itu. **(ant)**

Wali Kota Denpasar Resmi Akhiri Masa Jabatannya

Wali Kota dan Wakil Wali Kota Denpasar, Bali, Ida Bagus Rai Dharmawijaya Mantra dan IGN Jaya Negara secara resmi mengakhiri masa tugasnya terhitung 17 Februari 2021, sehingga menyerahkan memori jabatan kepada Plh Wali Kota Denpasar I Made Toya.

Rai Dharmawijaya Mantra pada acara penyerahan memori jabatan kepada Plh Wali Kota Made Toya di Gedung Graha Sewakadama Denpasar, Rabu, mengatakan bahwa setiap derap ada batas masanya, sebagaimana langkah pengabdian sebagai Wali Kota Denpasar telah tiba pada garis akhirnya. Maka dengan segala kerendahan hati pihaknya memohon diri dari ruang pengabdian tersebut menuju ke ruang pengabdian berikutnya.

Kegiatan yang digelar dengan disiplin penerapan protokol kesehatan ini dihadiri Asisten I Pemprov Bali I Gede Indra Dewa Putra, Ketua DPRD Kota Denpasar I Gusti Ngurah Gede, Kepala Kajari Denpasar Luhur Istigfar, Dandim



1611 Badung Kolonel Inf Made Alit Yudana, Kapolresta Denpasar Kombes Pol Jansen Avitus Panjaitan serta Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar I Wayan Gede Rumega.

Dalam kesempatan tersebut, Rai Mantra mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang selama ini telah bersama-sama, langsung maupun tak langsung, membangun Kota Denpasar khususnya dalam gerakan muda menuju "Orange Economy", yakni gerakan ekonomi kreatif berbasis budaya tradisi lokal demi harga diri, harkat dan martabat masyarakat Kota Denpasar serta kesejahteraan bersama.

Rai Mantra mengatakan sudah tentu ada banyak kekurangan, ada



Wali Kota Denpasar Rai Mantra resmi akhiri jabatannya (ANTARA/ I Komang Suparta/Ist/2021)

banyak kelemahan yang harus dikuatkan dan kesalahan yang harus diperbaiki, entah yang bersifat individual, komunal, maupun institusional.

"Untuk itu saya memohon maaf yang sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya kepada semua pihak selama menjabat ada kesalahan," kata Rai Mantra

Sementara Jaya Negara yang juga merupakan Wali Kota Denpasar terpilih mengatakan

bahwa pihaknya siap melanjutkan estafet kepemimpinan Wali Kota Rai Mantra yang fokus pembangunan ekonomi kreatif dan industri kreatif sebagai terobosan ekonomi keberlanjutan akan terus digencarkan.

"Jadi sejak awal kami berkomitmen untuk membangkitkan industri kreatif, sehingga ke depan akan terus dilanjutkan ke arah yang lebih baik," ujarnya. (ant)

Pemkot Denpasar Ajak Generasi Milenial Gunakan Tenun Endek



Perajin menyelesaikan pembuatan kain Endek atau kain khas Bali dengan menggunakan alat tenun tradisional di Sentra Kerajinan Tenun Ikat Sekar Jepun, Denpasar, Bali, Jumat (19/2/2021). (Antara News Bali/Nyoman Hendra/2021)

DINAS Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mengimbau kaum milenial menggunakan kain tenun Endek Bali setiap Selasa guna melestarikan dan mempromosikan warisan budaya setempat itu.

"Kain tenun Endek adalah kain khas Pulau Bali yang harus dilestarikan dan tidak boleh punah ditelan zaman," kata Kepala Dinas

Koperasi UMKM Kota Denpasar Made Erwin Suryadarma Sena di Denpasar, Jumat.

Imbauan itu sesuai dengan SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.

Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar mendukung lang-

kah Gubernur Bali Wayan Koster yang mengimbau masyarakat menggunakan busana berbahan kain tenun Endek Bali sebagai upaya melestarikan tenun tradisional khas Bali, sekaligus menggeliatkan produk Industri Kecil Menengah (IKM) lokal pada masa pandemi COVID-19.

Pihaknya mendukung SE Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 itu dengan mengajak kaum milenial untuk menggunakan kain tenun Endek dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus mendukung Gerakan Nasional Bangsa Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Pihaknya juga memberikan pelatihan kepada perajin dalam membuat kain tenun Endek Bali dengan motif yang lebih modern agar menarik di kalangan milenial, sekaligus membantu memasarkan produk kain tenun Endek Bali di masa pandemi COVID-19.

"Kain tenun Endek Bali diharapkan menjadi fesyen bagi kaum milenial di "Pulau Dewata" dengan rancangan motif-motif dan gaya anak muda," ujarnya.

Pihaknya akan berupaya menggandeng kaum milenial untuk mempromosikan kain tenun Endek Bali supaya semakin populer dan banyak yang berminat untuk menggunakannya.

Kain tenun Endek Bali saat ini sudah terdaftar sebagai Kekayaan Intelektual Komunal Ekspresi Budaya Tradisional di Kementerian Hukum dan HAM.

Warisan budaya Bali ini juga mendapatkan momentum tampil di kancah dunia, setelah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Bali dengan Christian Dior, dalam penggunaan kain tenun Endek Bali sebagai koleksi busana musim semi dan musim panas pada 2021. (ant)

Denpasar Prioritaskan Vaksinasi COVID-19 Tahap II untuk Lansia

PEMERINTAH Kota Denpasar Provinsi Bali memprioritaskan vaksinasi COVID-19 tahap II untuk warga lanjut usia (lansia) yakni 60 tahun ke atas yang berjumlah 52.144 orang.

Juru Bicara Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) COVID-19 Kota Denpasar, I Dewa Gede Rai di Denpasar, Kamis, mengatakan hingga kini program vaksinasi tahap II para lansia yang dimulai 23 Februari 2021 itu sebanyak 193 orang.

Dewa Rai mengatakan seluruh lansia di Kota Denpasar berhak menerima vaksinasi COVID-19. Pendaftaran dapat dilakukan secara online pada <http://denpasar.kemkes.go.id>.

"Bagi lansia yang belum terdaftar dapat melakukan pendaftaran secara online den-



gan dibantu oleh sanak saudara," kata Dewa Rai yang juga Kabag Humas dan Protokol Kota Denpasar ini.

Ia mengatakan

lansia agar tidak ragu untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bagi para lansia yang belum mengetahui informasi tentang vaksinasi dapat menghubungi atau konsultasi dengan Puskesmas terdekat.

"Kami harapkan jangan ragu, bagi lansia yang masih ada keraguan dapat berkonsultasi dengan Puskesmas terdekat, sehingga mendapatkan informasi tentang pelaksanaan vaksinasi dengan baik dan benar," ujarnya.

Sementara itu, seorang lansia bernama Wayan Budi mengaku ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19 sebagai upaya antisipasi penyakit terse-



Petugas kesehatan memberi vaksin kepada lansia di Denpasar. ANTARA/I Komang Suparta

but karena pandemi tersebut membuat ketakutan dirinya.

"Saya ingin mendapatkan vaksinasi COVID-19. Saya siap

divaksin. Karena saya yakin vaksin tersebut dapat mencegah terjadinya penularan virus corona," ujarnya. **(ant)**

Musim Hujan, Diskes Denpasar Lakukan Penyemprotan Serentak Antisipasi DBD



Petugas Diskes Denpasar melakukan penyemprotan serentak antisipasi DBD. ANTARA/I Komang Suparta/2021

DINAS Kesehatan Kota Denpasar Provinsi Bali melakukan penyemprotan (fogging) secara serentak guna mengantisipasi penyebaran penyakit demam berdarah dengue (DBD) saat musim hujan di daerah setempat.

"Kami mengajak masyarakat mewaspadai

penyakit demam berdarah di musim penghujan ini. Karena itu kami mengajak melakukan penyemprotan serentak di seluruh wilayah Kota Denpasar," kata Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Masyarakat, Dinas Kesehatan Kota Denpasar, dr. Ida Bagus Eka Putra saat di konfirmasi di Denpasar, Rabu.

Ia mengatakan saat ini masyarakat tidak boleh lengah dengan penyakit DBD. Karena saat ini warga hanya konsentrasi dalam penanganan pandemi COVID-19. Tetapi DBD harus terus diperhatikan dan diwaspadai, sebab DBD akan menyebar saat musim hujan.

"Walaupun saat ini kita sedang masa pencegahan dan penanganan COVID-19, Tapi kita juga wajib mewaspadai penyakit DBD," ujarnya.

Eka Putra lebih lanjut menjelaskan, guna meminimal adanya kasus DBD di Kota Denpasar, Penyemprotan atau fogging serentak sudah dilaksanakan secara masif dan menyeluruh. Namun demikian, masyarakat diimbau untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar secara mandiri. Hal ini dapat dilaksanakan dengan pemantauan jentik nyamuk secara berkala dan pemberantasan sarang nyamuk (PSN) secara mandiri.

"Fogging hanya membasmi nyamuk dewasa saja, sedangkan jentik-jentik nyamuknya tidak mati, dan fogging membasmi nyamuk hanya pada saat hari itu saja, besoknya bila ada nyamuk baru yang lahir dari jentik tidak akan terbunuh," jelasnya

"Dengan melaksanakan secara mandiri gerakan 3 M Plus, yakni Menguras, Menutup, Menyingkirkan/Mendaur Ulang, dan Menaburkan bubuk larvasida (bubuk abate) pada tempat penampungan air yang sulit dibersihkan, hal ini dapat dilakukan secara rutin minimal seminggu sekali secara mandiri, sedangkan untuk 'fogging' massal sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa dan kKelurahan," ucapnya.

Ia berharap masyarakat secara aktif untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menghindari adanya genangan air di rumah atau pun wilayah sekitar rumah. **(ant)**

Disdukcapil-KUA Badung Kerja Sama Wujudkan Validasi Data Kependudukan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Badung, Bali bersinergi dengan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat dalam upaya mewujudkan validasi data kependudukan.

Sinergi itu diwujudkan dalam bentuk Penandatanganan Kerja Sama (PKS) antara Kepala Dinas Dukcapil Badung, AA. Ngurah Arimbawa dengan Kepala KUA se-Kabupaten Badung dalam program Badung Aku Sapa atau Administrasi Kependudukan Satu Paket.

"Penandatanganan Kerja Sama (PKS) ini dalam rangka mengintegrasikan layanan administrasi kependudukan antara Dinas Dukcapil dengan KUA," ujar Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil AA. Ngurah Arimbawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Kamis.

Ia mengatakan, selama ini masyarakat Badung yang beragama Islam yang melangsungkan perkawinan melalui KUA dan sudah mendapatkan buku

nikah tidak semua melaporkan perkawinannya ke Dinas Dukcapil Badung sehingga ada kemungkinan ketimpangan data yang ada dengan kenyataan di masyarakat.

"Penandatanganan PKS ini kami lakukan dalam upaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat serta sinergitas pelayanan utamanya akurasi data perkawinan penduduk Badung yang beragama Islam dalam basis data kependudukan," katanya.

Sebagai tindak lanjut dari PKS itu, pihaknya akan memasang aplikasi 'AKU DICARI' atau Administrasi Kependudukan Daftar Sendiri Cetak Sendiri di masing-masing Kantor KUA.

Nantinya, Kepala KUA akan menggunggah buku nikah pada aplikasi AKU DICARI sehingga data perkawinan dari masyarakat secara otoma-



Kadisdukcapil AA. Ngr Arimbawa saat Penandatanganan Kerja Sama dengan Kepala KUA se-Badung dalam program Badung Aku Sapa di Kantor Dinas Dukcapil, Rabu (17/2).

tis masuk data base kependudukan di Dinas Dukcapil Badung.

"Setelah data perkawinan masyarakat masuk di dinas, tentu nanti akan ada proses perubahan Kartu Keluarga (KK) dan KTP, sehingga nanti masyarakat bisa mencetak sendiri dokumen kependudukannya melalui

aplikasi AKU DICARI ini," ungkap Ngurah Arimbawa.

Ia menambahkan, pihaknya berharap KUA dapat mendukung program itu sehingga nantinya dapat berjalan dengan baik sehingga validasi kependudukan di wilayah Badung benar-benar terwujud. (adv)

Pasangan Bupati-Wabup Badung Terpilih Ikuti Ritual Upacara Mejaya-Jaya



Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung, Bali, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa beserta istri masing-masing mengikuti prosesi upacara mejaya-jaya di Pura Lingga Bhuana Puspem Badung, Rabu (17/2). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PASANGAN Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Badung, Bali, terpilih hasil Pilkada Serentak tahun 2020, I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa beserta istri masing-masing mengikuti prosesi ritual upacara Mejaya-Jaya di Pura

Lingga Bhuana Puspem Badung.

"Upacara Mejaya-jaya yang difasilitasi oleh Dinas Kebudayaan Badung ini merupakan serangkaian acara pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Badung yang rencananya akan dilaksanakan pada

tanggal 26 Februari mendatang," ujar Bupati terpilih I Nyoman Giri Prasta, Rabu.

Prosesi upacara mejaya-jaya Bupati dan Wakil Bupati Badung terpilih itu dipimpin oleh Ida Pedanda Ketut Timbul dari Griya Gede Kawi Sunia Timbul Mengwi dan dihadiri oleh Plh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Ketua Fraksi PDIP DPRD Badung AA Anom Gumanti, Kadis Kebudayaan Gde Eka Sudarwitha, Kepala BKPSDM Gede Wijaya, Kasatpol PP IGAK Suryanegara dan Ketua Majelis Desa Adat Badung, AA Putu Sutarja.

I Nyoman Giri Prasta mengatakan, upacara Mejaya-Jaya tersebut dilakukan bertujuan untuk membersihkan pengaruh-pengaruh negatif atau mala dalam diri seorang calon pemimpin.

"Upacara ini juga dilakukan agar kami mendapatkan kesucian jasmani maupun rohani, dalam mengemban tugas

melayani dan mensejahterakan masyarakat," katanya.

Ia menambahkan, pada periode kedua masa jabatannya, pihaknya akan fokus dalam membangkitkan perekonomian di Badung dengan selalu melakukan koordinasi secara internal maupun dengan pemerintah pusat untuk menumbuhkembangkan ekonomi makro masyarakat Badung.

"Persoalan darurat pandemi COVID-19 dan darurat ekonomi merupakan dua hal yang menjadi fokus kami dan kami juga berkomitmen menyediakan vaksin gratis untuk masyarakat Badung," ungkap Giri Prasta.

Setelah melaksanakan upacara Mejaya-Jaya tersebut, juga dilakukan kegiatan Penyerahan Memori Akhir Masa Jabatan Bupati Badung periode tahun 2016-2021, oleh Nyoman Giri Prasta kepada Plh. Bupati Badung Wayan Adi Arnawa. (adv)

Pemkab Badung Harap Desa Adat Terus Bersinergi

PLH. Bupati Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa berharap desa adat di wilayah tersebut dapat terus menjaga sinergitas dengan jajaran pemerintahan, baik itu dengan jajaran desa dinas, kelurahan, kecamatan maupun Pemerintah Kabupaten Badung.

“Karena bagaimanapun juga, muara dari tata kelola pemerintahan adalah bagaimana dapat mensejahterakan masyarakat kami. Jangan ada dikotomi ada pemerintahan dinas dan pemerintahan desa adat. Ini yang saya harapkan kedepan,” ujar Plh. Bupati, Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Senin.

Menurutnya, hal tersebut juga penting dilakukan mengingat saat ini, semua sedang menghadapi wabah COVID-19 yang sangat berdampak bagi sebagian besar masyarakat Badung yang menggantungkan sektor pariwisata dan perlu upaya dan sinergi penanganan bersama.

“Kami sangat berharap dari

sektor pariwisata. Sedangkan kalau wabah ini masih ada, tentu keamanan dan kenyamanan tidak akan terjadi di wilayah Badung,” katanya.

Untuk itulah, Plh. Bupati Wayan Adi Arnawa juga mengajak dan menghimbau kepada pengurus desa adat agar bersama sama dapat menjadi contoh dalam menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat sehari-hari dengan tetap menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19.

“Mari bersama-sama menyatukan diri. Badung yang mengandalkan pariwisata, dengan adanya pandemi Covid-19 ini, tentu menjadi kendala. Kalau kami tidak bersama-sama tentu sulit. Pengawasan penanganan pandemi ini harus terus dilakukan dengan menjalin sinergi dengan semua pihak,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala atau Bendesa Adat Tanjung Benoa, Made Wijaya menjelaskan, kondisi



Plh. Bupati Badung, Bali, I Wayan Adi Arnawa (kanan).
Antaraneews Bali/HO-Humas Badung/fik

si perekonomian masyarakat desa adat yang terganggu akibat pandemi COVID-19, tentu juga berdampak pada sektor ketahanan pangan warga.

Untuk itu, pihaknya juga akan membantu masyarakat dari dana desa adat seperti dengan program bantuan yang diberikan menjelang Hari Raya Nyepi dan Galungan untuk membantu

kebutuhan pokok masyarakat berupa sembako seperti yang sudah rutin dilakukan sebelumnya.

“Pada situasi seperti sekarang, ketahanan pangan masyarakat harus sangat diperhatikan, karena masyarakat tidak memiliki sawah, tentu sangat membutuhkan,” kata Bendesa Adat yang baru dikukuhkan tersebut. (adv)

Badung Terapkan Penggunaan Tenun Endek



Sekretaris Daerah (Sekda) Badung, I Wayan Adi Arnawa.
Antaraneews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, menerapkan penggunaan busana berbahan kain tenun endek/kain tradisional Bali setiap hari Selasa sebagai tindak lanjut dari Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 04 Tahun 2021 tentang Penggunaan Kain Tenun Endek Bali/Kain Tenun Tradisional Bali.

“Penggunaan kain tenun endek ini bisa diterapkan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk BUMD yang ada di wilayah Badung,” ujar Sekretaris Daerah (Sekda) Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Selasa.

SE Gubernur Bali, salah satunya berisi imbauan penggunaan busana berbahan kain tenun

Endek Bali/kain tenun tradisional Bali dalam berbagai aktivitas setiap hari Selasa sebagai upaya untuk melestarikan, melindungi, dan memberdayakan kain tenun endek Bali/kain tenun tradisional Bali.

Untuk menyosialisasikan kebijakan Gubernur Bali terkait penggunaan kain tenun Endek Bali di lingkungan pemerintah setempat tersebut, Pemkab Badung juga membuat kebijakan yang dituangkan dalam SE Nomor: 060/556/Setda tentang Penggunaan PDH Endek/Kain Tenun Tradisional Bali.

“Kami sampaikan kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Badung agar menerapkan serta menyosialisasikan program penggunaan kain endek,” katanya.

Sekda Adi Arnawa menjelaskan penggunaan Pakaian Dinas Harian Endek atau pakaian endek atau kain tenun tradisional Bali

bebas tersebut dilengkapi dengan atribut pakaian dinas lengkap setiap hari Selasa kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan kerja masing-masing.

“Hanya saja, kebijakan ini dikecualikan jika bertepatan dengan dengan Purnama dan Tilem yang menggunakan pakaian adat sembahyang serta saat Hari Jadi Provinsi dan HUT Ibukota Kabupaten Badung yang menggunakan PDH Adat Bali,” ungkapnya.

Di wilayah Badung terdapat empat kelompok perajin endek yang berada di wilayah Badung Utara. Kelompok tersebut memiliki ciri khasnya masing-masing seperti Tenun Getasan, Tenun Pererenan, Tenun Sibang Kaja, Tenun Mambal.

Masing-masing dari endek itu memiliki ciri khas berbeda seperti Endek Jepun di Mambal, Endek Jegog Bagus di Pererenan, Endek Fortuna di Getasan dan Endek Gurita di Sibang. (adv)

Badung Ubah Aturan Waktu Bagi Usaha Makanan Dalam PPKM Mikro

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali mengubah aturan waktu operasional kegiatan usaha bagi pelaku usaha makanan yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor 944/547/Setda tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa/Kelurahan dan Desa Adat atau berbasis mikro.

Jika sebelumnya seluruh kegiatan usaha, termasuk penjualan makanan di restoran, rumah makan, warung, pedagang makanan dan sejenisnya dibatasi pada pukul 08.00 hingga 21.00 Wita, saat ini penjualan makanan untuk layanan pesan-antar atau dibawa pulang dapat tetap buka sesuai jam operasional saat normal.

"Artinya, ketika ada orang makan di tempat hanya diperkenankan sampai pukul 21.00 Wita. Tetapi, kalau melayani take-away atau pesan antar dan makanan dibawa pulang,

silahkan sampai jam berapa pun bisa membuka tempat usahanya," ujar Plh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa di Mangupura, Selasa.

Ia mengatakan kebijakan itu diambil dalam upaya mendukung UMKM terutama pertumbuhan ekonomi di Badung dengan memberi kesempatan pelaku usaha makanan untuk terus buka asalkan tidak melayani pembeli yang makan di tempat setelah pukul 21.00 Wita.

"Meskipun dapat tetap buka sesuai jam operasional saat normal, kami minta pelaku usaha untuk terus memperketat protokol kesehatan pencegahan COVID-19 serta mencegah terjadinya kerumunan," katanya.

Pelaku usaha juga diminta untuk tidak melayani pengunjung yang tidak menggunakan masker serta memasang stiker bertuliskan "No Mask No Service" atau tanpa masker, tidak dilayani pada tempat usahanya.



Plh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

Selama perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Mikro, kegiatan belajar mengajar di Badung masih dilaksanakan secara daring.

Pemkab Badung juga akan terus melakukan penguatan pengujian atau testing berupa rapid test secara acak di tempat-

tempat publik termasuk kepada para warga negara asing.

"Surat Edaran ini mulai berlaku pada hari ini sampai dengan hari Senin (8/3) mendatang dan akan dievaluasi lebih lanjut sesuai kondisi perkembangan kasus COVID-19 di Badung," kata I Wayan Adi Arnawa. (adv)

Capaian MCP Pemkab Badung Sebesar 90,58 Persen



Plh. Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa (kiri) bersama perwakilan Tim Direktorat Koordinasi dan Supervisi Wilayah V KPK RI Ramdhani. Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

CAPAIAN Monitoring Center of Prevention (MCP) Pemerintah Kabupaten Badung, Bali, sebagai program pencegahan korupsi terintegrasi tercatat sebesar 90,58 persen.

"Progres capaian kami sebesar 90,58 persen ini merupakan suatu yang luar biasa dan harus dipertahankan dan terus diting-

katkan," ujar Plh. Bupati Badung, I Wayan Adi Arnawa dalam keterangan Humas Badung yang diterima di Mangupura, Rabu

Ia mengatakan, apabila dilihat dari indikator delapan komponen yaitu Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), Optimalisasi Pajak Daerah, Manajemen Aset Daerah dan Tata Kelola Dana Desa, menurutnya secara prinsip pelaksanaan di Badung sudah mengacu kepada Permendagri.

"Terkait dengan APIP juga sudah berjalan di pemerintah kabupaten dan kedepannya kami akan mendorong dari segi kapasitas SDM," katanya.

Plh. Bupati Wayan Adi Arnawa menjelaskan, terkait Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dari segi inovasi sudah luar biasa walaupun terus melakukan pembenahan dan transparansi.

Untuk pengadaan barang dan jasa, menurutnya Pemkab Badung juga sudah menjadi percontohan untuk memberikan suatu materi terkait pengadaan barang dan jasa, sedangkan terkait Manajemen Aparatur

Sipil Negara, pihaknya sedang melakukan penataan, terutama terkait reward dan punishment berkaitan dengan penambahan penghasilan.

"Kami dorong dengan sistem yang sedang kami bangun dengan jelas terutama terkait dengan manajemen dan karir Aparatur Sipil Negara," ungkap Plh. Bupati Wayan Adi Arnawa.

Ia menambahkan, Manajemen Aset juga akan ditingkatkan lagi sistem yang dibangun agar ada sinkronisasi antara perencanaan dan aset. Kemudian terkait Tata Kelola Dana Desa, di masa pandemi COVID-19 ini diharapkan stimulus dari dana-dana pusat.

"Kami berusaha semaksimal mungkin Pemkab Badung bebas dari korupsi. Mudah-mudahan dari pertemuan hari ini bisa memberikan masukan-masukan sehingga kedepannya dapat lebih maksimal di tahun mendatang," ujarnya. (adv)

Badung Raih Penghargaan Nasional KLHK dalam Pengelolaan Sampah

KABUPATEN Badung, Bali, berhasil meraih penghargaan peringkat empat tingkat nasional dalam pengelolaan sampah melalui penghargaan yang diberikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) saat peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2021.

"Penghargaan yang telah kami terima ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran dan seluruh pemangku kepentingan yang turut berpartisipasi atas pengelolaan sampah di Badung," ujar Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Badung, I Wayan Puja di Mangupura, Rabu.

Atas prestasi tersebut, Badung berhak mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp80.719.473 dan khusus untuk kelompok kategori pengelolaan sampah sebesar Rp6.710.351.

Wayan Puja menjelaskan, pihaknya bersyukur dan berter-

ima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas penghargaan itu.

Menurutnya, penghargaan tersebut berhasil diraih setelah Badung memenuhi dan melaksanakan lima kriteria penilaian seperti memiliki kebijakan tentang Kebijakan Strategi Daerah (Jakstrada), memiliki kebijakan terkait pengurangan sampah plastik, implementasi kebijakan pengurangan sampah plastik.

"Kriteria lainnya adalah memiliki inovasi atau kreativitas tentang pengurangan sampah dan kinerja fasilitas pengelolaan sampah sebelum masuk ke Tempat pembuangan Akhir seperti proses komposting, bank sampah dan TPS 3R," katanya.

Ia menjelaskan, Pemkab Badung telah mengeluarkan Peraturan Bupati Badung nomor 47 tahun 2018 tentang Penggunaan Kantong Plastik dan Peraturan Bupati Badung Nomor 48 tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan



Penyerahan penghargaan secara virtual untuk Pemkab Badung dalam peringatan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN) tahun 2021. ANTARA/HO-Humas Badung/fik

Reduce, Reuse dan Recycle melalui Bank sampah.

"Dalam Perbup Nomor 47, pelaku usaha dilarang menggunakan kantong plastik. Pelarangan penggunaan kantong plastik juga dilaksanakan pada kantor pemerintah dan swasta, pusat perbelanjaan, hotel, vila, akomodasi pariwisata dan restoran,"

ungkap Wayan Puja.

Sedangkan Perbup Badung Nomor 48 tahun 2018 dilaksanakan melalui Bank Sampah untuk menangani sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga. Dengan begitu, diharapkan masyarakat agar mampu memilah sampah yang dihasilkan di rumah tangga. (adv)

Pemkab Badung Dorong Masyarakat Budidayakan Hidroponik di Tengah Pandemi



Plh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat melakukan panen sayuran hidroponik di Rumah Hidroponik BPP Abiansemal di Desa Blahkiuh, Badung, Kamis (25/2). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

PEMERINTAH Kabupaten Badung, Bali, mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan masing-masing untuk membudidayakan sayuran secara hidroponik, khususnya untuk menjaga ketahanan pangan mereka di

tengah pandemi COVID-19.

"Di masa pandemi COVID-19 ini budi daya secara hidroponik dapat menjadi salah satu solusi bagi masyarakat dalam rangka meningkatkan ekonomi masyarakat di masing-masing rumah tangga," ujar Pelaksana

Harian Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa saat menghadiri panen sayuran hidroponik di Rumah Hidroponik Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Abiansemal di Badung, Kamis.

Untuk mendukung upaya tersebut, Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung akan berperan dan bertugas dalam proses sosialisasi pengembangan budi daya sayuran hidroponik sebagai program untuk masyarakat.

Sebagai salah satu cara budi daya tanaman pangan, menurut dia, hidroponik tidak memerlukan lahan yang luas dengan biaya cukup murah dan dapat memenuhi kebutuhan pangan rumah tangga di tengah pandemi COVID-19.

"Kami berharap kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Badung bersama jajarannya untuk dapat menyosialisasikan dan mengajak

masyarakat agar mau memanfaatkan pekarangan guna mengembangkan sayuran hidroponik," ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, ia juga berdiskusi dengan petugas penyuluh pertanian lapangan.

Ia meminta budi daya hidroponik terus dikembangkan sehingga akan mendapatkan panen komoditas yang memiliki nilai jual tinggi.

Ssalah satu Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL), I Made Suparsa, menjelaskan Rumah Hidroponik di BPP Abiansemal sebagai sarana edukasi budi daya secara hidroponik kepada masyarakat.

"Hidroponik memiliki berbagai keunggulan karena dapat dilakukan untuk semua sayuran. tidak memerlukan lahan yang luas, dari segi biaya juga sedikit dan pemeliharaannya cukup sederhana," ujarnya. (adv)

Pasangan GiriAsa Dilantik sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung

PASANGAN I Nyoman Giri Prasta dan Wakil Bupati I Ketut Suiasa (GiriAsa) secara resmi dilantik oleh Gubernur Bali Wayan Koster sebagai Bupati dan Wakil Bupati Badung untuk periode kedua masa bakti 2021-2024.

“Pelantikan bupati dan wali kota terpilih di Bali ini merupakan momentum penting dalam mengakselerasi pembangunan yang ada di wilayah masing-masing,” ujar Gubernur Wayan Koster saat Pelantikan Kepala Daerah dan Wakil kepala daerah terpilih hasil Pilkada serentak 2020 di Provinsi Bali, di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat.

Rangkaian acara pelantikan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat itu diawali dengan pembacaan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.51-259 tahun 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2020 di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.

Kegiatan dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan, penandatanganan berita acara sumpah jabatan dan fakta integritas, serta diakhiri dengan penyematan tanda pangkat dan jabatan kepada kepala daerah terpilih.

Gubernur Wayan Koster mengatakan, pihaknya berpesan kepada pasangan kepala daerah terpilih untuk dapat menghayati kepercayaan yang telah diberikan oleh masyarakat dengan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dalam melayani dan menyejahterakan masyarakat.

“Kami juga mengharapkan bupati dan wali kota terpilih untuk menjalin koordinasi dengan tertib, disiplin dan penuh rasa tanggung jawab dalam menjalankan roda pemerintahan,” katanya.

Karena terbatasnya jumlah undangan yang dapat hadir secara langsung, jajaran pemerintahan Badung menyaksikan acara pelantikan pasangan GiriAsa secara live streaming atau virtual



Pelantikan Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta dan dan Wakil Bupati Badung I Ketut Suiasa oleh Gubernur Bali di Kantor Gubernur Bali, Denpasar, Jumat (26/2). Antaranews Bali/HO-Humas Badung/fik

dari Gedung Command Center Dinas Kominfo Badung.

Kegiatan itu dihadiri Sekretaris Daerah Badung yang menjabat Pelaksana Harian (Plh) Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Ketua DPRD Badung Putu Parwata, Kapolres Badung AKBP Roby Septiadi, perwakilan Forkopimda Badung, Ketua KPU

Badung I Wayan Semara Cipta beserta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Badung

Sesuai menyaksikan pelantikan itu, I Wayan Adi Arnawa menjelaskan, dirinya berharap dengan kehadiran Bupati definitif tentu akan lebih efektif lagi di dalam tata kelola pemerintahan di Badung. (adv)

Bupati Badung Lanjutkan Program Strategis untuk Masyarakat



Bupati Badung I Nyoman Giri Prasta (kanan) dan Wabup I Ketut Suiasa. ANTARA/HO-Humas Badung

BUPATI dan Wakil Bupati Badung Provinsi Bali periode 2021-2024 yang baru dilantik I Nyoman Giri Prasta dan I Ketut Suiasa siap untuk melanjutkan berbagai program strategis pembangunan daerah untuk masyarakat.

“Terpilihnya kami kem-

bali tentu tidak terlepas dari kepercayaan yang diberikan oleh seluruh masyarakat kepada kami untuk melanjutkan dan meningkatkan capaian program strategis pembangunan daerah yang telah kami lakukan pada masa jabatan sebelumnya,” ujar Bupati Giri Prasta di Mangupura, Sabtu.

la mengatakan, pihaknya sudah menyiapkan program-program strategis yang diwujudkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026, guna melanjutkan kebahagiaan masyarakat Badung melalui pembangunan yang berlandaskan Tri Hita Karana.

“Dalam menyusun rancangan awal RPJMD tersebut, kami tetap menerapkan Pola Pembangunan Daerah Semesta Berencana (PPDSB) yang terdiri dari lima bidang prioritas yaitu bidang pangan sandang papan, pendidikan dan kesehatan, jaminan sosial dan tenaga kerja, adat agama dan budaya dan bidang pariwisata,” katanya.

Bupati Giri Prasta juga berupaya untuk terus meningkatkan pendapatan daerah sehingga program-program yang dicanangkan bisa tetap berjalan serta akan mengoptimalkan potensi pajak bumi dan bangunan dengan men-

guyayakan piutang pajak sebesar Rp600 miliar.

Selain itu, pihaknya juga akan melakukan ekstensifikasi pajak serta berharap juga ada bantuan pemerintah pusat untuk Kabupaten Badung.

“Kami optimis paling tidak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat di Badung bisa dilakukan,” ungkap Bupati Giri Prasta.

Berkaitan dengan pandemi COVID-19, ia mengajak semua pihak untuk menjaga kesehatan dan berkolaborasi dengan ekonomi agar semua dapat tetap berjalan karena dengan itu pihaknya yakin seluruh pihak bisa keluar dari pandemi.

“Fokus kami yang pertama adalah darurat pandemi COVID-19 dan yang kedua darurat ekonomi. Nanti kami berencana memberikan stimulus bagaimana menggerakkan ekonomi di bidang UMKM,” ujarnya. (adv)

Bupati Gianyar Yakin Daerahnya Bebas COVID-19 Secepatnya

BUPATI Gianyar, Made Mahayastra meyakini daerah yang dipimpinnya akan bebas COVID-19, secepatnya.

"Secepatnya, saya yakin itu," ujar bupati dengan tersenyum saat memperlihatkan data kasus COVID-19 dari layar handphone-nya kepada para pejabat di jajarannya di halaman belakang kantor Bupati Gianyar, Jumat.

Dalam siaran pers Diskominfo Gianyar, ia menunjukkan kini tidak ada satu desa/kelurahan di Kabupaten Gianyar yang masuk dalam zona merah. Rinciannya, sebanyak 17 desa/kelurahan zona hijau, 47 zona kuning dan enam desa berada dalam zona orange.

"Persentase kesembuhan kita 90 persen. Kita harus bangga, dan bersyukur," ujar politikus PDIP asal Payangan tersebut sambil menegaskan bahwa hal tersebut bukan sebuah capaian yang mudah.

Menurut dia, hal itu membutuhkan sebuah nyali dari seorang pemimpin, dan mem-

butuhkan dukungan dari semua pihak. "Kita ini sudah perang terbuka, semua komponen telah mendukung saya. Sebagai pemimpin, saya harapkan terus ada dukungan, karena untuk bisa bebas dari COVID-19," ujarnya.

Apa strategi yang dilakukannya dalam membebaskan Gianyar dari pandemi? Bupati Mahayastra pun menghela napas dan tidak mau mengungkapkan secara gamblang tindakan yang dilakukan, karena ia tidak mau menimbulkan ketersinggungan pihak lain.

"Intinya, saat ini saya terus bekerja, mencari solusi yang terbaik buat masyarakat. Saya berharap data terkait zona ini jika bertahan dua minggu saja, saya akan buka pendidikan tatap muka, saya juga akan ambil keputusan pemulihan ekonomi yang saat sulit dilakukan," ujar Bupati Mahayastra.

Didampingi para pejabat Pemkab Gianyar, ia mengungkapkan, selama pandemi covid-19 ini, pendapatan Pemkab Gianyar



Bupati Gianyar I Made Mahayastra (baju merah) saat berbincang dengan para pejabat Pemkab Gianyar, di halaman belakang kantor Bupati. (Foto Humas Gianyar)

menurun drastis. Pada triwulan pertama 2020 (Januari, Februari dan Maret), pendapatan Gianyar sudah masuk Rp540 miliar. Namun setelah itu hingga saat ini tidak sampai menyentuh Rp30 miliar.

"Sampai mau habis Februari ini baru Rp20 miliar kita dapat. Untuk bayar pegawai, mungkin kekuatan kita sampai Septem-

ber 2021," ujarnya.

Berdasarkan salah satu persoalan tersebut, Bupati Mahayastra meminta dukungan semua komponen masyarakat. "Saya hanya minta, semua pihak di Kabupaten Gianyar agar mendukung langkah yang saya ambil. Saya butuh dukungan untuk mengeluarkan Gianyar dari pandemi," tandasnya. **(ant)**

Sanjaya Resmi jadi Bupati Tabanan



Pelantikan Bupati Tabanan yang terpilih dalam Pilkada Serentak 2020, Komang Gede Sanjaya, oleh Gubernur Bali I Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, yang juga disiarkan live secara virtual, Jumat (26/2/2021). (FOTO Antara News Bali/Pande Yudha/2021)

BUPATI terpilih Pilkada Serentak Tahun 2020 Kabupaten Tabanan, Komang Gede Sanjaya yang berpasangan dengan Wakil Bupati Terpilih I Made Edi Wirawan, resmi dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati Tabanan

periode 2021-2026.

Pelantikan tersebut dilakukan serentak bersama lima Kepala Daerah dari lima Kabupaten/Kota di Bali, yakni Denpasar, Badung, Karangasem, Jembrana, serta Bangli, oleh Gubernur Bali I

Wayan Koster di Gedung Wiswa Sabha Utama Kantor Gubernur Bali, yang juga disiarkan live secara virtual, Jumat.

Gubernur Bali I Wayan Koster mengatakan, meskipun dalam masa pandemi Covid-19, seluruh proses Pilkada Serentak di Bali tanggal 9 Desember 2020 telah berjalan dengan lancar, nyaman, aman dan damai serta sukses.

"Pencapaian ini berkat kerja keras KPU, Bawaslu, TNI dan Polri, beserta jajarannya yang bersinergi dengan seluruh komponen masyarakat, karena itu, saya atas nama Pemerintah dan masyarakat Bali, memberikan apresiasi dan mengucapkan terima kasih kepada penyelenggara dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyelenggaraan Pilkada Serentak di Bali," ujar Koster.

Gubernur Bali Wayan Koster mengucapkan selamat kepada enam Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah di Enam Kabupaten/Kota di Bali, dan mengatakan pelantikan ini merupakan momentum penting dalam rangka percepatan proses pembangunan di Bali.

"Pasangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah patut bersyukur dan berbahagia karena telah mendapat kepercayaan dari masyarakat melalui proses demokrasi yang diselenggarakan sesuai peraturan perundang-undangan," imbuhnya.

Wayan Koster menambahkan kepercayaan yang telah diberikan masyarakat harus dihayati dan dimaknai sedalam-dalamnya untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab secara niskala dan sekala, serta diwujudkan secara nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana amanat Undang Undang Nomer 23 Tahun 2014. **(ant)**

Bupati Bangli Sematkan Pin Penghargaan Kepada Kades Terbaik

BUPATI Bangli I Made Gianyar SH, M.Hum menyematkan pin penghargaan Kintamani Award Tahun 2020 kepada Pemerintah Desa Terbaik atau kepala desa/kades terbaik di aula Kantor Camat Kintamani.

Dalam siaran persnya, Rabu, Bupati Bangli I Made Gianyar menyampaikan pelaksanaan kegiatan Kintamani Award tahun 2020 ini tetap berjalan walaupun masih dalam keadaan situasi pandemi COVID-19.

“Pelaksanaan Kintamani award ini perlu dilaksanakan setiap tahun untuk memberikan semangat atau motivasi kepada pemerintah desa guna memajukan desanya masing-masing,” katanya.

Made Gianyar juga menyampaikan kepada desa desa yang mendapatkan juara agar jangan terlena dan tetap terus bekerja lebih baik lagi supaya di tahun yang akan datang dapat mempertahankan prestasi yang sudah

diraih dan begitu pula kepada desa-desa yang belum meraih juara jangan berkecil hati, dan tetap semangat untuk bekerja demi membangun desa.

Kegiatan Kintamani Award ini bukan semata-mata ajang gengsi antar desa tetapi kegiatan ini murni untuk memotivasi kegiatan di desa karena tanpa suksesnya pemerintah desa, kesuksesan pemerintah kabupaten juga akan terhambat, kalau pemerintah desa sudah menjalankan pemerintahannya dengan baik kami di pemerintah kabupaten pasti akan menjadi baik juga karena kesuksesan Kabupaten Bangli berawal dari kesuksesan desa-desa.

Dalam acara itu itu hadir pula Camat Kintamani, Kapolsek Kintamani, Danramil Kintamani, Kepala Desa Se Kecamatan Kintamani, dan Pengawas Desa Kecamatan Kintamani.

Camat Kintamani I Wayan Bona menyampaikan pelaksan-



Bupati Bangli I Made Gianyar sematkan pin penghargaan kepada kades terbaik

aan Kintamani Award ini berjalan dengan transparan, tanpa menganaktirikan salah satu desa. Penilaian ini dilaksanakan dengan beberapa kriteria penilaian yaitu tingkat perencanaan, pelaksanaan, pemetaan administrasi desa, penataan kelembagaan adat, penataan lingkungan, keamanan dan ketertiban desa serta pelaporan.

“Kintamani awards bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan kualitas pada pemerintahan di desa sesuai dengan tupoksi masing-masing dan untuk memotivasi desa agar lebih profesional, berinovasi di dalam menjalankan suatu kinerja dan tanggung jawabnya,” ujar I Wayan Bona. (ant)

KPK: Capaian MCP Pemkab Klungkung 90,24 Persen



Penandatanganan Nota Kesepakatan antara Pemkab Klungkung dengan Kodim 1610 dan Polres Klungkung Tentang Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketertarikan dan Ketertiban Umum di Ruang Rapat Kantor Bupati Klungkung, Rabu (24/2/2021). (Antara News Bali/HO-Humas Pemkab Klungkung/2021)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat capaian rata-rata Monitoring Centre For Prevention (MCP) Pemkab Klungkung tahun 2020 sebesar 90,24 persen.

“Atas capaian tersebut, Klungkung menempati peringkat kelima di Provinsi Bali dan peringkat 22 se-Indonesia,”

kata Person in Charge (PIC) KPK Wilayah Bali, Handayani, dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi MCP Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK di ruang rapat Praja Mandala Kantor Bupati Klungkung, Rabu.

Dalam Rakor yang dihadiri Bupati Klungkung, I Nyoman

Suwirta, Satgas V. I Korwil V-KPK RI, Ramdani, dan Sekda Klungkung I Gede Putu Winastira itu, Handayani menjelaskan Korsupgah KPK merupakan program untuk melakukan kontrol pemantauan untuk pencegahan atau Monitoring Centre For Prevention (MCP).

Pihaknya juga memaparkan adapun capaian MCP di Pemerintah Kabupaten Klungkung dengan delapan indikator, diantaranya Perencanaan dan Penganggaran APBD mencapai 100 persen, lalu Pengadaan Barang dan Jasa mencapai 98,91 persen.

Selain itu, Pelayanan Terpadu Satu Pintu mencapai 88,24 persen, Kapabilitas APIP mencapai 82,9 persen, Manajemen ASN mencapai 97,5 persen, Optimalisasi Pajak Daerah mencapai 56,05 persen dan Manajemen Aset Daerah mencapai 100 persen, Tata Kelola Dana Desa mencapai 90 persen.

“Dari semua area intervensi tersebut, capaian Kabupaten Klungkung sampai dengan

pertengahan Januari 2021 sebesar 90,24 persen. Kedepan, saya harapkan Kabupaten Klungkung bisa mempertahankan hasil ini, bahkan bisa meningkatkannya, sehingga mencapai hasil yang lebih baik lagi,” katanya.

Dalam sambutannya, Bupati Suwirta mengatakan capaian MCP Kabupaten Klungkung sebesar 90,24 persen merupakan suatu pencapaian yang luar biasa dan tentunya harus dipertahankan, bahkan kalau bisa ditingkatkan.

“Kami di Pemerintah Kabupaten Klungkung selaku pelayanan masyarakat selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk kesejahteraan masyarakat,” ujar Bupati Suwirta.

Bupati Suwirta juga menambahkan untuk kedepannya jajaran OPD terkait agar lebih meningkatkan koordinasi dan kerja sama yang baik antar instansi, jangan hanya berpuas diri dengan hasil yang kita capai sekarang. (ant)

Sehari Setelah Dilantik, Bupati Karangasem Sambangi Banjar MageteLu - Desa Tista Abang

SEHARI setelah dilantik, Bupati Gede Dana bersama Anggota DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana, DPRD Provinsi Bali I Nyoman Oka Antara, DPRD Kabupaten Karangasem Ni Kadek Sri Dewi Wahyuni, menyambangi Dusun MageteLu, Desa Tista Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu.

Dalam sambang desa itu, Bupati Gede Dana mengapresiasi penanganan COVID-19 yang telah dilakukan selama ini. Ia juga mengucapkan terima kasih atas kepedulian banyak pihak terkait penanganan COVID-19 di wilayahnya.

Hari itu juga dilaksanakan penyerahan bantuan dari DPR RI Komisi IX, Dapil Bali I Ketut Kariyasa Adnyana, kepada masyarakat setempat untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak.

Bantuan yang diberikan diantaranya 200 paket sembako, 200 paket BPT (bantuan Pangan Tambahan), 50 paket makanan tambahan ibu hamil (Bumil) dan 50 paket makanan tambahan balita.

Dalam kesempatan itu, Bupati Gede Dana juga didampingi Camat Abang, Kapus Abang, Perbekel Desa Tista, Babin Desa Tista, Babinsa Desa Tista dan Kadus MageteLu. **(ant)**



Sehari setelah dilantik, Bupati Gede Dana bersama Anggota DPR RI Ketut Kariyasa Adnyana, DPRD Provinsi Bali I Nyoman Oka Antara, DPRD Kabupaten Karangasem Ni Kadek Sri Dewi Wahyuni, menyambangi Dusun MageteLu, Desa Tista Abang, Kabupaten Karangasem, Bali, Sabtu (27/2/2021). (Foto Antara News Bali/2021)

Menparekraf Apresiasi Penerapan Prokes di Desa Wisata Penglipuran



Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno (kanan) meninjau kawasan Desa Wisata Penglipuran, Kabupaten Bangli, Bali. Antaranews Bali/Naufal Fikri Yusuf

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengapresiasi penerapan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penyebaran COVID-19 di kawasan Desa Wisata Penglipuran Kabu-

paten Bangli, Bali.

"Kami meninjau kesiapan Desa Wisata Penglipuran di masa pandemi dalam penerapan prokes dan saya sangat mengapresiasi kepatuhan warga dan pengunjung desa wisata ini," ujar

Sandiaga Uno di Bangli, Jumat.

Ia mengatakan saat ini desa wisata tersebut mulai dikunjungi oleh wisatawan. Dan untuk menjaga kunjungan wisatawan ia meminta prokes yang telah diterapkan agar terus dijaga.

"Karena hanya dengan kepatuhan kita dan peningkatan testing, tracing dan juga vaksinasi, kita akan bangkitkan pariwisata di Bali dan pulihkan ekonomi kreatif," katanya.

Sandiaga Uno berharap apa yang telah dilakukan pengelola Desa Wisata Penglipuran juga dapat menjadi motivasi bagi desa-desa wisata lainnya di seluruh wilayah Indonesia untuk membangkitkan kembali dan membuka peluang kerja bagi masyarakatnya.

Pihaknya juga akan berupaya untuk menyelenggarakan sejumlah kegiatan di desa wisata dengan bekerja sama dengan jajaran pemerintah di daerah sebagai guna mendatangkan wisatawan.

"Jadi kegiatan-kegiatan yang

out of the box kita harapkan bisa meningkatkan kunjungan wisatawan tapi tentunya yang perlu diperhatikan adalah prokes dan juga kepatuhannya," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Bali I Putu Astawa menambahkan, sebanyak 177 desa wisata di Bali siap untuk mendukung upaya pemulihan sektor pariwisata yang terdampak pandemi COVID-19.

Pihaknya juga akan terus menyiapkan destinasi-destinasi desa wisata yang ada agar nantinya wisatawan yang berkunjung selama masa pandemi dapat merasa aman dan nyaman dengan desa wisata yang terjaga kebersihan serta kelestariannya.

"Justru sekarang ini orang lebih tertarik untuk berkunjung ke kawasan desa wisata karena tempatnya terbuka sekaligus ini juga sejalan dengan kebijakan pak menteri bahwa yang kita gaungkan dari desa wisata ini adalah green tourism dan pariwisata sehat," katanya. **(ant)**

PPKM Mikro di Buleleng Diterapkan Pada Enam Desa/Kelurahan

SATGAS Penanganan COVID-19 Buleleng akan menerapkan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro pada enam desa/kelurahan untuk menekan laju penyebaran COVID-19.

Enam wilayah itu yakni Kelurahan Banyuning, Kelurahan Banyuasi, Desa Pejajaran, Desa Menyali, Desa Tajun, dan Desa Pemaron.

"Pembatasan yang kita lakukan ini adalah PPKM mikro yang bersifat soft, tidak lockdown ya. Pembatasan aktivitas saja hingga pukul 21:00 Wita saja," ucap Sekretaris Daerah Buleleng Gede Suyasa dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu.

Menurut Suyasa, jika didasarkan pada kriteria yang dikeluarkan melalui Instruksi Mendagri, Buleleng tidak memiliki desa yang memenuhi kriteria dalam PPKM Mikro. Di Buleleng belum ditemukan dalam satu desa terjadi kasus terkonfirmasi mencapai 20

Rumah Tangga (RT).

"Meski begitu, Buleleng terus berupaya menekan laju penyebaran COVID-19. Maka, inti-inti dari Instruksi Mendagri tersebut diambil untuk diterapkan," katanya.

Sehubungan dengan pembatasan aktivitas ekonomi, Sekda Suyasa minta dengan sangat kepada dinas terkait dan Camat untuk intens menyosialisasikan kepada seluruh warga masyarakat, sehingga saat sidang oleh Tim Yustisi tidak ada lagi masyarakat yang tidak mengetahui adanya pembatasan.

Suyasa selaku Sekretaris Satgas Penanganan COVID-19 Buleleng juga sangat mengapresiasi peran para anggota Satgas dan para tenaga medis yang sangat gigih dalam menghadapi pandemi COVID-19. "Ini terbukti dari data kasus angka terkonfirmasi di Buleleng saat ini masih cukup stabil," katanya.

Bahkan, kalau dilihat di Desa Tajun yang akan dilakukan



Bupati Buleleng Putu Agus Suradnyana dalam Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tahun 2020 di Rumah Jabatan Bupati Buleleng, Rabu (10/2/2021). ANTARA/Made Adnyana/2021

pembatasan hanya ada tiga rumah dengan satu halaman dengan jumlah pasiennya hanya tujuh orang.

"Harusnya ini tidak masuk kriteria juga. Jika PPKM Mikro diberlakukan, maka aktivitas keluar masuk orang terbatas. Jadi, pembatasan di enam desa tersebut akan dibuat tidak terlalu ketat melalui Surat Edaran Bupati

Buleleng," kata Suyasa.

Selain penekanan terhadap upaya meminimalkan angka terkonfirmasi baru, Suyasa juga meminta kepada seluruh jajaran SKPD lingkup Pemkab Buleleng untuk bersama-sama meluruskan informasi-informasi tidak benar yang beredar di masyarakat melalui media sosial. **(ant)**

KPK Apresiasi Capaian Aksi Pemberantasan Korupsi di Kabupaten Jembrana



KPK melakukan supervisi di Kabupaten Jembrana, yang mendapatkan nilai cukup baik dalam program pemberantasan korupsi terintegrasi, Senin (22/2). (Antaraneews Bali/Humas Jembrana/2021)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK), memberikan apresiasi positif terhadap pencapaian aksi pemberantasan korupsi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Jembrana, Bali.

"Dari program pemberantasan korupsi terintegrasi yang merupakan program KPK, nilai

Pemkab Jembrana melampaui rata-rata nasional," kata Ketua Satgas V Korupsi KPK RI Sugeng Basuki, saat melakukan supervisi di Kabupaten Jembrana, Senin.

Ia mengatakan tahun 2020, nilai Kabupaten Jembrana mencapai 85 persen, di atas nilai

nasional yang 75 persen.

Menurutnya, selain penindakan, pihaknya juga melakukan pendampingan untuk mencegah korupsi dari awal, seperti program pemberantasan korupsi terintegrasi tersebut.

"Untuk memberantas korupsi harus dicabut sampai ke akar-akarnya. Selain penindakan, kami juga melakukan pendampingan," katanya.

Kepada Pemkab Jembrana, ia minta sumberdaya manusia yang memiliki komitmen untuk mencegah korupsi ditingkatkan, termasuk hingga ke desa-desa.

Pelaksana Hariang Bupati Jembrana I Nengah Ledang, yang menerima supervisi KPK di Aula Jimbarwana, Kantor Bupati Jembrana di Negara mengatakan tahun 2019, nilai daerahnya mencapai 67 persen.

"Ada peningkatan yang cukup signifikan dalam pem-

berantasan korupsi terintegrasi, karena sekarang nilainya naik menjadi 85 persen lebih," katanya.

Ia mengatakan, salah satu terobosan KPK dalam pemberantasan korupsi adalah dengan sistem pelaporan lewat aplikasi MCP Korsurgah.

Ia menyebutkan, penilaian cukup bagus diberikan kepada Bappeda, keuangan dan pengelolaan aset yang mencapai 91,6 persen, kemudian layanan pengadaan barang dan jasa dengan nilai 90,5 persen, pelayanan perizinan terpadu sebesar 92,8 persen dan indikator manajemen ASN dengan nilai 100 persen.

Meski sudah mendapatkan nilai yang baik, ia mengingatkan aparat sipil negara di Pemkab Jembrana untuk memperbaiki kekurangan-kekurangan sesuai catatan KPK. **(ant)**

TNI Bentuk "Pilot Project" Posko Desa untuk COVID-19

KOREM 163/Wira Satya beserta jajaran kodim membentuk pilot project posko desa yang bertujuan untuk mempercepat penanganan COVID-19 di wilayah Bali.

"Pembentukan pilot project posko desa merupakan inisiasi Kodam IX/Udayana dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Bali dan diharapkan menjadi percontohan bagi Posko Desa lainnya," kata Danrem 163/Wira Satya Brigjen TNI Husein Sagaf dalam keterangan pers di Denpasar, Bali, Sabtu.

Ia mengatakan pilot project posko desa direncanakan berlangsung di 11 desa/kelurahan dari lima kabupaten/kota. Adapun rincian tempat pelaksanaannya yaitu untuk Kabupaten Badung dilakukan di Desa Unggasan, Desa Dalung dan Desa Tuban. Lalu, Kabupaten Gianyar dilaksanakan di Desa Mas, Kabupaten Tabanan di Desa Dauh Peken, Kabupaten Bangli yaitu Desa Abuan. Untuk Kota

Denpasar yaitu Desa Pemecutan Kaja, Desa Sumerta Kelod, Desa Pemecutan Kelod, Desa Pemogan dan Kelurahan Sesetan.

Adapun fungsi pelaksanaan tugas posko desa sama halnya seperti fungsi penanganan COVID-19 baik dalam hal pendisiplinan, melaksanakan tracing dan juga mengawasi pelaksanaan isolasi mandiri.

"Untuk itu desa atau kelurahan semakin penting dan diberdayakan untuk memahami situasi terkait pandemi COVID-19 yang terjadi di wilayahnya," jelasnya.

Dalam pelaksanaannya agar struktur organisasi posko segera dilengkapi dengan surat tugas atau surat keputusan Kepala Desa/Lurah serta membuat peta bagan wilayah desa.

Kemudian juga memberikan penekanan data-data yang harus dilengkapi di posko. Selain itu, memperhatikan mekanisme kegiatan yang harus dilaksana-



Danrem 163/Wira Satya dalam rapat virtual terkait pembentukan pilot project posko desa, di Denpasar, Bali, Jumat (19/02/2021). ANTARA/HO-Penrem 163/Wira Satya. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2021)

kan baik bagi zona hijau, kuning, oranye dan merah.

"Tracing segera dilakukan dan apabila menemui kendala terkait ketersediaan rapid test antigen agar segera dikoordinasikan ke pihak Korem 163/Wira Satya untuk selanjutnya dikoordinasikan dengan Kesehatan Kodam IX/Udayana," jelasnya.

Dalam rapat virtual terkait pembentukan pilot project posko desa yang dihadiri oleh seluruh dandim jajaran Korem 163/Wira Satya, Danrem mengatakan saat pelaksanaannya juga melakukan pendataan warga yang isolasi mandiri di desa dan mengajukan kebutuhan dalam pelaksanaan isolasi tersebut. **(ant)**

BPJAMSOSTEK Bali-Denpasar Dorong Sektor Informal jadi Peserta



Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan (Antaraneews Bali/HO-BPJAMSOSTEK)

BADAN Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJAMSOSTEK) Cabang Bali-Denpasar mendorong pekerja sektor informal di wilayah kerjanya menjadi peserta BPJAMSOSTEK sehingga bisa memperoleh manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan.

"Dengan menjadi peserta BPJAMSOSTEK maka peserta bisa memperoleh manfaat yang luar

biasa, baik itu pekerja di sektor formal maupun informal," kata Kepala BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar Mohamad Irfan di Denpasar, Kamis.

Apalagi, lanjut dia, dengan adanya peningkatan manfaat program melalui PP Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

Oleh karena itu, pihaknya terus

mendorong semakin banyak sektor informal atau yang tidak berstatus aparatur sipil negara (ASN) untuk menjadi peserta program-program BPJAMSOSTEK.

"Kami rutin menyosialisasikan mengenai manfaat program BPJAMSOSTEK, khususnya bagi pekerja informal agar dapat terlindungi dari berbagai risiko pekerjaannya," ucapnya.

Irfan pun mendorong pemberi kerja, baik swasta maupun pemerintah daerah yang mempekerjakan tenaga non-ASN agar dapat mendaftarkan pekerjaannya sebagai peserta BPJAMSOSTEK.

BPJAMSOSTEK Cabang Bali Denpasar mewilayahi lima kabupaten/kota di Provinsi Bali yakni Kota Denpasar, Kabupaten Badung, Tabanan, Jembrana dan Buleleng.

Menurut dia, hal yang dilakukan tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai Direktur Utama BPJAMSOSTEK Anggoro Eko Cahyo yang ditunjuk oleh

Presiden Joko Widodo untuk menakhodai BPJAMSOSTEK dalam mencapai tujuannya memberikan perlindungan menyeluruh dan kesejahteraan kepada pekerja Indonesia dan keluarganya.

Presiden Joko Widodo telah melantik jajaran Direksi BPJAMSOSTEK untuk periode 2021-2026 di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa (23/2).

Sebelumnya, dalam keterangan tertulisnya, Anggoro menyatakan dirinya dan jajaran direksi diberi amanah langsung oleh Presiden Joko Widodo untuk mengelola dana pekerja yang besar ini dengan integritas yang tinggi, tata kelola yang baik dan tentu saja harus tetap inovatif.

"Kami juga akan melakukan digitalisasi jaminan sosial karena ada 3 tantangan utama yang harus kami hadapi, yaitu peningkatan cakupan peserta, peningkatan manfaat dan layanan bagi pekerja, dan optimalisasi hasil investasi dana pekerja," ujarnya. **(ant)**

BI Optimis Ekonomi Bali Tumbuh Positif di 2021

Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali optimis ekonomi di Pulau Dewata akan tumbuh positif pada 2021 ini, didukung perkiraan selesainya proses pemberian vaksin kepada warga dan penurunan kasus COVID-19.

“Dengan demikian, akan mengembalikan aktivitas ekonomi di berbagai sektor, termasuk aktivitas konsumsi, investasi, kinerja fiskal, ekspor dan impor,” kata Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho di Denpasar, Selasa.

Pihaknya memperkirakan pertumbuhan positif akan dimulai pada triwulan II-2021, sehingga secara keseluruhan tahun 2021 perekonomian Bali diprediksi tumbuh positif.

Trisno mengemukakan ekonomi Bali pada triwulan IV 2020 tumbuh minus 12,21 persen (yoy), sedikit membaik dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar minus 12,32 persen (yoy).

“Secara keseluruhan tahun, ekonomi Bali mengalami kontraksi atau tumbuh minus

9,31 persen pada tahun 2020. Dari sisi penggunaan, kontraksi tahunan tertinggi terjadi pada komponen impor luar negeri (-78,34 persen) dan ekspor luar negeri (-76,23 persen,” ujarnya pada acara Obrolan Santai BI Bareng Media (OSBIM) itu.

Selanjutnya komponen investasi (-12,21 persen) dan konsumsi rumah tangga (-3,65 persen). Sementara konsumsi pemerintah masih tumbuh positif 0,17 persen (yoy).

Dari sisi lapangan usaha, hampir seluruhnya mengalami pertumbuhan negatif, dengan kontraksi tahunan terdalam pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan (-31,79 persen), akomodasi makan dan minum (-27,52 persen) serta pengadaan listrik, air, dan gas (-16,49 persen).

Selanjutnya Trisno pun



Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho didampingi Deputi Kepala Perwakilan Wilayah Bank Indonesia Provinsi Bali Rizki Ernadi Wimanda dan Ekonom Ahli Grup Perumusan dan Implementasi KEKDA Setyawan Santoso (Antara/Rhisma)

merekendasikan lima langkah strategis untuk pemulihan ekonomi Bali. Pertama, mendorong pelaku pariwisata untuk memperoleh sertifikat CHSE untuk meyakinkan bahwa Bali siap menerima wisatawan.

“Kedua, mendorong UMKM onboarding sehingga memperluas pemasaran. Ketiga, mempercepat realisasi belanja

daerah,” ujarnya.

Keempat, mendorong sektor pertanian untuk menerapkan GAP (Good Agriculture Practice), menggunakan teknologi digital dalam berproduksi (digital farming) dan memasarkan produknya melalui e-commerce. Kelima, mendorong pembayaran secara non tunai, utamanya menggunakan QRIS. (ant)

PLN Bali Keberatan Tiang Provider Komunikasi di Dekat Jaringan Listrik



Manager Komunikasi PLN Bali, Made Arya (kiri). (ANTARA/ I Komang Suparta/2021)

PT Perusahaan Listrik Negara (PLN/Persero) Unit Distribusi Bali merasa keberatan dengan tiang milik provider komunikasi yang ditancapkan berimpitan atau di dekat tiang listrik milik PLN,

karena akan mengganggu saat melakukan pemeliharaan atau gangguan jaringan listrik.

“Kami merasa terganggu dengan adanya tiang ‘beranak’ dimiliki provider yang akhir-akhir

ini menancapkan berimpitan dengan milik PLN. Ini jelas akan mengganggu petugas terkait keselamatan kerja saat melakukan pemeliharaan jaringan listrik,” kata Manager Komunikasi PT PLN (Persero) Bali, Made Arya, di Denpasar, Rabu (24/2).

Ia mengatakan keberadaan tiang provider komunikasi yang terpasang mengelilingi tiang listrik milik PLN tersebut sangat mengganggu, terlebih saat ada gangguan jaringan listrik, sehingga petugas bekerja keras untuk memperbaiki kabel listrik. “Petugas kami terganggu dengan adanya tiang provider tersebut, karena ketika melakukan perbaikan atau pemeliharaan jaringan akan mengganggu untuk menjangkau kabel PLN,” ujarnya.

Menurut Made Arya, perusahaan provider komunikasi semestinya memperhitungkan pemasangan tiang tersebut, sehingga tidak sampai mengganggu milik PLN yang sudah melakukan kajian maupun perencanaan tempat-tempat pemasangan tiang tersebut.

Oleh karena itu, kata dia, Dinas Tata Ruang Kota dan Kabupaten dan instansi terkait yang mempunyai kewenangan untuk melakukan pengaturan terhadap perusahaan provider telekomunikasi tersebut. “Kami harapkan pemerintah setempat yang mempunyai wewenang untuk melakukan pengaturan, sehingga tidak sampai saling mengganggu ketika melakukan perbaikan kabel atau jaringannya,” ucapnya. (ant)